

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A0JA/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN.

Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985.

B. Buku

Nur Bald Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Lakibang Medistama, 2008), hal 65.

Mujiburohman, Dian Aries, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: STPN PRESS, 2022), hal 22.

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal 60.

Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 2.

- Ngadiyo, Mulyadi. “Kewenangan JPN Sebagai Kuasa Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN” *Universitas Islam Riau*, 2022, hal 45.
- Ngadiyo, Mulyadi. “Kewenangan JPN Sebagai Kuasa Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN” *Universitas Islam Riau*, 2022, hal 60.
- Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980), hal 15.
- Fence M. Wantu, 2011, *idee des Recht: Kepastian Hukum, keadilan, kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), hal 63 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
- Sudikno Mertokusumo, *Sedjarah Peradilan Dan Perundang-Undanganja Di Indonesia Sedjak 1942: dan apakah kemanfaatannja bagi kita bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Disertasi Fakultas Hukum UGM. Jogjakarta, 1971), hal 8.
- Wirjono Prodjodikoro tahun 1946 telah merumuskan Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Perkara Tata Usaha Pemerintahan.
- Fence M. Wantu, Mutia Ch Thalib, Suwitno Y. Imran. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2010), hal 21- 22.
- The Liang Gie. *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila, Cetakan Kedua* (Yogyakarta: Supersukses, 1982), Hal 10.
- Sudikno, Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Jakarta: Liberty, 2007), Hal 6.
- Bandingkan dengan W. Riawan Tjandra, *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa: Clean And Strong Government*). Disertasi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. 2009.
- Sudikno, Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Liberty, 2007), Hal 6.

- Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997) Hlm 304.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2018), Halaman 3
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghania, 1998) hal 66.
- Aries, Dian. *Negara H. A. P. T. U. Hukum Acara Peradilan TUN.* (Yogyakarta: STPN Press, 2022).
- Pamungkas, Gerry. *Independensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)*. UIN Jakarta, Februari, 2015.
- Yusuf, Muhammad. “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara” *Jurnal Yudistika*. Volume 2 Nomor 2.
- Ghonu, Ismail. *Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*. Volume 31 No 2 Hal 15.
- Nicholas Cowdery, “*independence of the prosecution*” makalah disampaikan pada conference of rule of law: the challenges of a changing world. 2007.
- M. Thalbah. *Penegakan hukum oleh kejaksaan dalam paradigma hukum progresif*. *Jurnal magister hukum*. Vol 1 no 1 Januari 2005. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005) Hal 86.
- Bagir Mana'an. *Urgensi Independensi Dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustium*, Vol 14 No 1. (Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) Hal 43.
- Raziana Tridjakasih. *Ambivalensi Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Presiden F.D Rosevelt*. Program Pascasarjana UI. 1997. Hal 4.
- R.M. Surachman dan Jan S Maringka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016) Hal 99.

Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hakim*. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hal 100.

Yusuf, Muhammad. *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar Hal 17.

C. Internet

(<https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-atribusi--delegasi--dan-mandat-lt5e0d680832ee8>) diakses pada Senin, 23 Oktober 2023.

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8?page=2#!>) Diakses pada Sabtu, 18 November 2023.

(https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14) diakses pada Kamis, 12 Oktober 2023.

<http://kejar-jaksel.go.id/staricpage.php?page=organisasidatun>. Diakses pada 23 Januari 2024.

<https://www.hukumonline.com/klik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1> diakses pada Sabtu, 20 Januari 2024.

<https://www.ohcr.org/en/instruments-mechanism/instruments/basicprinciples-independence-judiciary> diakses pada 12 Februari 2024.

<https://www.hukumonline.com/klik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1> diakses pada Sabtu, 20 Januari 2024.

<http://kejar-jaksel.go.id/staricpage.php?page=organisasidatun>. Diakses pada 23 Januari 2024.

Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non Litigasi Dengan Mediasi
<https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Penyelesaian-Perkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html> diakses pada 24 Januari 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1> diakses pada 12 Februari 2024.

https://persatuan-jaksaindonesia.org/view.php?do=pji_inc#.VI4ZP_mSygl,

diakses pada 4 Februari 2024

